

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR :

- Adami Chazawi, 2005, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**. Malang: BayuMedia Publishing.
- Djoko Prakoso, 1998**Hukum Penitensir Di Indonesia**. Bandung:Armico.
- Ermansjah Djaja,2010, **Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ferry Hernold, 2014.**Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi**. Yogyakarta: Thafa Media.
- Jawade Hafidz Arsyad, **2013, Korupsi dalam Perspektif HAN**. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Juni Sjafrien Jahja,2012 **Say No To Korupsi**. Jakarta: Visi Media Pustaka
- Krisna Harahap,2006, **Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung**. Bandung: Grafitri
- Lilik Mulyadi,2011,**Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek, dan Masalahnya**. Bandung: PT Alumni Bandung.
- Masruchin Ruba'I, S.H., M.S,dkk, 2014, **Hukum Pidana**. Malang: Bayumedia Publishing.
- M Hamdan,2005, **Tindak Pidana Suap dan Money**. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Muhammad Djafar Saidi, 2013, **Hukum Keuangan Negara**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**. Jakarta: PT Greasindo
- Muladi,2002**Lembaga Pidana Bersyarat**. Bandung: Alumni.
- Peilohy, M.W. Patti, 1994, **Antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Pengadilan Mengenai pembayaran Uang Pengganti**. Bagian I, Ujung pandang: Dipajaya.
- Peter Mahmud Marzuki,2010, **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana.
- Roeslan Saleh,1987, **Stelsel Pidana Indonesia**. Jakarta: Bina Aksara.

Soejono dan H. Abdurahman,2003. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto, 1981.**Kapita Selekta Hukum Pidana**. Bandung: Alumni.

#### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang **Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Tindak pidana Korupsi**, Tahun 2001 Nomor 134  
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang **Perbendaharaan Negara**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Tahun 2001 Nomor 140  
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang **Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme**, lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara no 3851

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung no 5 tahun 2014 **tentang pidana pembayaran uang pengganti Berita Negara** nomor 2041 tambahan berita negara nomor 8.

#### **INTERNET**

[http://www.kompasiana.com/dzikriramadhan/pengertian-korupsi-dan-faktor-penyebab-korupsi\\_57f693238823bd2d1a4c749e](http://www.kompasiana.com/dzikriramadhan/pengertian-korupsi-dan-faktor-penyebab-korupsi_57f693238823bd2d1a4c749e) diakses terakhir hari Rabu(4 Oktober 2017) pada pukul 09.00 WIB

Ade Mahmud, **Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Mimbar Justicia**, volume 3, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, 2017, Hlm 15